

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk upaya yang ditujukan pada masyarakat lemah agar dapat hidup mandiri, mandiri disini dimaksudkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memenuhi kehidupannya, serta dapat menghadapi tantangan dan permasalahan yang akan muncul kedepannya. Dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas masyarakat, baik dari segi pendidikan, keterampilan, pengelolaan ekonomi, dan sumber daya alam disekitarnya.

2.1.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya (*empowerment*) yang berarti kekuatan atau kemampuan, hal ini dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan sumber yang memberikan kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada kelompok masyarakat yang lemah atau belum berdaya dalam memenuhi kebutuhan taraf hidupnya, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, sandang, dan papan (Totok Mardikanto, 2017 dalam Sulasih et al., 2021). Menurut Hasdiansyah (2023, hlm. 1) pemberdayaan masyarakat memiliki konsep dimana individu atau sekelompok masyarakat diberikan kesempatan, ilmu dan wawasan terkait pengelolaan sumber daya yang ada, dengan tujuan meningkatkan kemandirian, *control*, partisipasi, dan taraf hidupnya. Dalam konsep ini juga, masyarakat dituntun agar berperan aktif dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang diperlukan sebagai solusi keluarnya dari masalah-masalah di masa mendatang, serta memiliki akses terhadap sumber daya yang dapat mendukung dalam perkembangan sosial dan ekonomi mereka.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan memiliki arti yang lebih luas, sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam arah praksis, sering dikaitkan dengan pendekatan partisipatif, dimana pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat langsung. Dalam pendekatan partisipatif masyarakat tidak hanya sebatas hanya sebagai konsumen (objek) program saja, akan tetapi sebagai produsen (subjek). Hal ini disebabkan masyarakat ikut serta atau dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai manfaat dari hasil program yang diadakan.

Proses pemberdayaan, bukan hanya sebatas pembuatan program untuk masyarakat, karena setiap input perlu adanya output dan outcome, seperti sebuah karya fisik yang dihasilkan oleh jerih payah sendiri, dapat diakui dan diterima oleh orang lain. Menurut Moelijarto (1996) (Afriansyah et al., 2023, hlm. 6) setiap diri manusia mempunyai potensi yang dapat digali dan dikembangkan. Pemberdayaan sendiri pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk membangun potensi-potensi yang ada pada diri seseorang dengan berupa pemberian motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan setiap potensi yang ada.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk strategi yang digunakan dalam pembangunan, sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1, ayat 8 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dimana pembangunan yang baik dan berkelanjutan tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan inklusif, karena masyarakat sasaran program turut dilibatkan atau diikutsertakan dalam program. Karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Proses kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat yang terjadi, tentunya memiliki fungsi dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan

masyarakat sasaran. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan agar masyarakat dapat tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri dalam segala aspek, yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik dari segi pendidikan, keterampilan atau pengelolaan sumber daya yang ada, serta mampu mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidupnya dan lingkungannya. Selain itu, adanya pemberdayaan juga membutuhkan beberapa upaya, salah satunya dukungan dari berbagai belah pihak, seperti pemerintah ataupun Instansi swadaya masyarakat. “Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari 14 hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan” (Indrika, 2013, hlm 13).

Mardikanto dan Poerwoko (2012) dalam (Hamid, 2018, hlm. 13) menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat memiliki 9 upaya perbaikan, diantaranya:

a. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Perbaikan ini ditujukan pada keterikatan pemberdayaan masyarakat dengan Pendidikan, dimana pemberdayaan masyarakat memerlukan pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan disini adalah bentuk perbaikan pendidikan dalam segi membangkitkan semangat belajar masyarakat tanpa kenal usia, waktu, dan tempat yang berlangsung secara terus-menerus atau dalam studi pendidikan masyarakat lebih dikenal dengan pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*).

b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Perbaikan ini masih berkaitan dengan perbaikan pendidikan tentang bagaimana pentingnya meningkatkan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Dengan berkembangnya pembelajaran tersebut, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, terutama terhadap sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk, peralatan atau sarana dan prasarana, serta instansi pemasaran.

- c. Perbaikan tindakan (*better action*)
Melalui dua aspek perbaikan, yaitu perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber daya-sumber daya lainnya yang lebih baik, diharapkan dapat membentuk tindakan yang semakin membaik juga.
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
Terlaksananya perbaikan kegiatan/tindakan yang semakin membaik, diharapkan mampu memperbaiki kelembagaan atau instansi yang ada di masyarakat juga, terlebih pada pengembangan jaringan kemitraan usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.
- e. Perbaikan usaha (*better business*)
Setelah terjadi perbaikan-perbaikan sebelumnya pada bidang pendidikan, aksesibilitas, kegiatan atau tindakan, dan kelembagaan, diharapkan mampu memperbaiki usaha atau bisnis yang dijalankan oleh masyarakat sasaran program.
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*)
Dengan perbaikan bisnis yang dilakukan atau dijalankan, diharapkan mampu memperbaiki pendapatan atau penghasilan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
Dengan adanya perbaikan pendapatan, tentunya dapat dengan mudah memperbaiki lingkungan baik dari segi materi maupun sosial, karena tidak jarang kerusakan lingkungan disebabkan karena kurangnya pengelolaan ekonomi dan faktor kemiskinan atau terbatasnya penghasilan.
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*)
Pengelolaan ekonomi yang baik, tentunya dapat menghasilkan keuangan yang baik. Adanya pendapatan memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan mampu mengantarkan setiap keluarga atau masyarakat kedalam situasi kehidupan yang lebih baik.

i. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Dengan situasi kehidupan dan lingkungan baik dari segi materi dan sosial yang semakin membaik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.

Sedangkan Agnes Sunartiningsih (2004: 140) dalam (Indrika, 2013, hlm 14) juga menyampaikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan atau dilaksanakan di lapangan melalui berbagai program diharapkan dapat membantu:

- a. Menganalisis situasi dan kondisi yang ada di lingkungannya.
- b. Mencari alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada di masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas hidup dan kecakapan hidup (*life skill*) masyarakat sebagai anggota.
- d. Meningkatkan aspek perekonomian, seperti penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Mengembangkan sistem agar dapat mempermudah akses sumber daya yang dibutuhkan.

Dengan begitu sebagaimana uraian yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa adanya pemberdayaan dapat membantu masyarakat untuk lebih berdaya, berdaya di sini dimaksudkan bahwa masyarakat mulai mampu meningkatkan kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik atau menginjak ke kesejahteraan, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu dalam pendapatan pada perekonomian.

2.1.1.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat, tentunya memerlukan strategi atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, seperti meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut (Siti, 2020) terdapat beberapa strategi pemberdayaan masyarakat yang dianggap dapat di implementasikan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

a. Strategi dalam Menciptakan Iklim, Memperkuat Daya, dan Melindungi

Pertama merupakan strategi dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat pengembangan (fasilitas). Strategi ini berfokus pada kemampuan setiap masyarakat, dimana masyarakat di dorong untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kedua, strategi untuk meningkatkan potensi atau kekuatan yang dimiliki masyarakat (*empower*). Dapat diketahui dalam proses pemberdayaan masyarakat upaya paling mendasar merupakan peningkatan pada pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti informasi, modal, teknologi, peluang usaha atau lapangan kerja, dan pasar tempat adanya transaksi jual beli. Selain itu, pemberdayaan sendiri tidak luput dari pembangunan sarana dan prasarana berupa akses rumah tangga, pelayanan sosial, berupa pendidikan dan lainnya, peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan yang disediakan dan program khusus lansia.

Pemberdayaan juga tidak hanya meliputi pemberdayaan pada tiap-tiap individu masyarakat saja, sifat dan watak masyarakat, penanaman nilai-nilai modernisasi sesuai perkembangan zaman, seperti kerja keras, tidak terisolasi (keterbukaan), hemat, dan tanggung jawab juga merupakan aspek penting dalam pemberdayaan. Dengan begitu uraian di atas merupakan bentuk pembaharuan pranata sosial dan pengintegrasian ke dalam program dan peranan masyarakat di dalamnya. Hal terpenting yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan untuk alternatif pemecahan masalahnya sendiri. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat memiliki keterikatan dengan pembangunan, penanaman, dan praktik demokrasi.

Ketiga merupakan implementasi pemberdayaannya atau memberdayakan yang berarti melindungi. Dapat diketahui proses pemberdayaan masyarakat sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat tidak berdaya atau lemah agar tidak lebih lemah dan tidak berkuasa atas yang kuat. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian dukungan dan dorongan kepada orang-orang yang tidak berdaya dan lemah merupakan hal yang paling mendasar. Melindungi masyarakat disini juga bukan berarti mengisolasi masyarakat dengan sikap yang dominan. Akan tetapi, melindungi dengan berupa pencegahan terjadinya ketidak seimbangan

persaingan atau dikenal kesenjangan sosial berdasarkan strata serta melindungi dari adanya eksploitasi yang terjadi oleh kaum kuat kepada kaum yang lemah.

Memberdayakan juga bukan berarti mendorong masyarakat untuk bergantung pada program-program amal yang berupa bantuan dari pihak lain, karena sesuatu yang berharga dan bernilai harganya diciptakan dari hasil usaha dan kerja keras diri sendiri. Oleh karena itu, memberdayakan dan melindungi masyarakat merupakan bentuk untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri, memungkinkan dan membangun kemampuan atau potensi diri masyarakat untuk kualitas kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

b. Strategi dalam Membentuk Program Pembangunan Desa

Dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak akan luput dari program-program pembangunan, salah satunya program pembangunan Desa. Menurut Sunnyoto Usman (2004) dalam (Siti, 2020) pemerintahan negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengambil inisiatif untuk membentuk berbagai jenis program pedesaan, diantaranya pada

- 1) Program pembangunan pertanian, program ini memiliki tujuan ke arah peningkatan hasil dan pendapatan petani, juga untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan kekurangan pangan di desa, serta memenuhi kebutuhan untuk ekspor hasil pertanian yang diperoleh kepada negara-negara maju.
- 2) Program Industrialisasi pedesaan, tujuan utama pada program ini adalah pengembangan pada hasil kerajinan tangan masyarakat desa. Adanya program industrialisasi pedesaan juga bertujuan sebagai alternatif pemecahan masalah pada aspek kepemilikan dan penguasaan atas hak tanah dan lapangan kerja atau peluang usaha di desa.
- 3) Program pembangunan masyarakat desa terpadu, program ini dibentuk dengan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan masyarakat pada aspek kemandirian, peningkatan kualitas hidup, dan produktivitas masyarakat. selain itu, terdapat enam aspek pembangunan masyarakat desa terpadu, yaitu (1) Mengembangkan pertanian padat karya, (2) Memperluas peluang usaha dan lapangan pekerjaan, (3) Meningkatkan lapangan pekerjaan

dengan industri kecil mandiri, (4) Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, (5) Mengembangkan kota yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, (6) Membentuk instansi atau lembaga yang mampu mengkoordinasikan proyek multisektoral.

- 4) Strategi pusat pertumbuhan, program ini dibentuk sebagai alternatif untuk mengidentifikasi kesenjangan pertumbuhan antara desa dan kota, dengan mengetahui kesenjangan ideal tersebut kota dapat menjadi tempat untuk mendistribusikan produksi dari desa. Hal ini juga dapat dilakukan dengan membuat pasar di dekat dengan desa yang berperan sebagai pusat informasi terkait keinginan dan kemampuan antara konsumen dan produsen, serta untuk mengumpulkan hasil-hasil yang didapat dari sumber daya di pedesaan.

Selaras dengan strategi program pembangunan pedesaan, Jefta Leibo (1995) dalam (Siti, 2020), mengemukakan strategi yang dapat menjadi pelengkap pada strategi program pembangunan pedesaan, diantaranya: (1) Strategi dalam gotong royong, (2) Strategi dalam pengembangan teknis profesional, (3) Strategi konflik, dan (4) Strategi pembelotan budaya. Pengertian dan tujuan dari empat strategi di atas, sebagai berikut:

- a. Strategi dalam Gotong Royong

Strategi gotong royong ini berfokus pada keterlibatan masyarakat atau masyarakat sebagai suatu sistem sosial untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari strategi gotong royong dapat dipercaya bahwa mampu membawa perubahan yang ingin dicapai melalui partisipasi atau keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang strata sosial. Strategi gotong royong juga sifatnya demokratis dan dilakukan atas dasar sukarela dan inisiatif setiap individu.

- b. Strategi dalam Pengembangan Teknis Profesional

Strategi pengembangan teknik profesional disini mengarah pada pentingnya peran agen perubahan atau agen inovasi dalam alternatif pemecahan masalah kelompok masyarakat melalui pengembangan norma, peran, prosedur yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Agen perubahan atau reformasi juga

berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, seperti menentukan agenda pembangunan, menyediakan layanan, dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat serta alternatif permasalahan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu, agen perubahan atau agen inovasi sendiri merupakan sebuah tugas yang diberikan kepada salah satu anggota masyarakat yang dipercaya dapat memiliki pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif untuk mengurangi tantangan dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan atau pembangunan.

c. Strategi Konflik

Strategi konflik disini dilihat dari strata sosial masyarakat, dimana lingkungan dan kehidupan masyarakat dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu saja atau kelompok dengan strata sosial yang dapat dibilang menengah ke atas. Adanya strategi konflik ini diarahkan pada perlunya pembentukan organisasi untuk penduduk strata rendah atau strata ke bawah agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada sumber daya, perlakuan adil, dan demokratis. Strategi ini juga menekankan pada perubahan organisasi dan peraturan (struktural) melalui alokasi sumber daya, keputusan komunitas, dan kekuasaan.

d. Strategi Pembelotan Budaya

Mungkin dengan nama strategi pembelotan budaya dapat membuat seseorang salah paham dan menganggapnya sebagai konsonan negatif, dimana pembelotan sendiri merupakan penyimpangan. Namun, strategi pembelotan budaya dalam pemberdayaan masyarakat disini dimaksudkan pada perubahan subjektif kepada individu yaitu dimulai dari dalam diri masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk mulai mengenal perubahan zaman, keluar dari kehidupan yang *kolot* atau kehidupan yang jauh dari modernisasi dengan merubah nilai-nilai pribadi menuju cara hidup baru, seperti meningkatkan rasa *humanity* dengan banyak bersosialisasi dan berpartisipasi dalam suatu komunitas, dan sebagainya.

2.1.1.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hamid (2018, hlm. 17) dalam bukunya “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat” tiap-tiap individu yang menginginkan kesuksesan dalam setiap kegiatan atau pekerjaan, hendaknya memiliki prinsip kerja, karena

prinsip merupakan suatu aturan atau komitmen dalam melakukan pekerjaan, yang mana individu dengan memiliki prinsip dalam hidupnya cenderung lebih mudah dalam membuka kesuksesan.

Begitu pula dalam pemberdayaan, hendaknya kegiatan yang dilakukan memegang teguh prinsip pemberdayaan, hal ini tidak hanya berlaku pada ranah pribadi, tetapi dalam organisasi dan komunitas yang ada di masyarakat baik di kota maupun desa. Faktanya masih banyak masyarakat yang memerlukan kebutuhan dalam bentuk pemberdayaan, walau masyarakat dikatakan mampu dalam segi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Fasilitator dalam pemberdayaan perlu memegang teguh prinsip pemberdayaan, seperti prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan atau kemandirian, berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas (Albrecht, 1988 dalam Afriansyah et al., 2023, hlm. 28).

Menurut Irawan (2022) dalam diktat kuliah pengembangan bahan pengajaran mata kuliah pemberdayaan masyarakat tahun akademik 2022/2023 terkait pemberdayaan masyarakat, diantara enam prinsip yang disebutkan Albercht (1988) di atas, terdapat empat prinsip yang umum dan sering digunakan dalam proses suatu program pemberdayaan masyarakat, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip berkelanjutan.

- a. Prinsip kesetaraan merupakan prinsip inti dan utama yang harus ada atau dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena program-program pemberdayaan yang berjalan dilaksanakan secara bersama tanpa melihat gender, baik laki-laki maupun perempuan. Seluruh pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan perlu saling menghormati dan menghargai setiap peranan masing-masing, hal ini dibentuk dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, serta keahlian atau keterampilan satu sama lain yang dapat dipelajari bersama demi kesuksesan program.
- b. Prinsip partisipatif merupakan prinsip yang menstimulasi kemandirian masyarakat, karena masyarakat didorong untuk aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pada program. Untuk mencapai kemandirian masyarakat, tentunya memerlukan waktu dan proses

pendampingan. Proses pendampingan juga memerlukan pendamping atau tutor yang berpegang teguh atau berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

- c. Prinsip keswadayaan atau kemandirian merupakan prinsip yang berfokus pada kemampuan atau potensi masyarakat dan sumber daya lokal yang ada. Pada konsep ini orang lemah dan tidak berdaya dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan atau pelaksanaan program. Karena pada dasarnya masyarakat sasaran memiliki potensi-potensi yang harus di gali dan dikembangkan, seperti kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah dan kendala yang dihadapi, mengetahui keadaan atau kondisi lingkungan sekitarnya, memiliki kemauan, usaha, dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama di patuhi.
- d. Prinsip berkelanjutan merupakan prinsip dimana program pemberdayaan dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pada awal pelaksanaan program biasanya peran pendamping lebih dominan dan lebih berpengaruh dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu masyarakat mulai mampu mengelola kegiatannya, bahkan akan menghapus peran pendamping itu sendiri.

Sedangkan prinsip akuntabilitas menurut Afriansyah et al (2023, hlm. 29) merupakan prinsip yang bertanggung jawab terhadap capaian atau keberhasilan dan kegagalan suatu program. Seorang fasilitator dalam melaksanakan tugas pada proses pemberdayaan, perlu “memperhatikan sikap akuntabilitas”. Terdapat 5 aspek akuntabilitas menurut Kusumasari et al (2015) dalam “Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III” tentang akuntabilitas, berikut merupakan 5 aspek akuntabilitas, di antaranya:

- a. Akuntabilitas sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*), dimana hubungan yang dimaksud disini merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak baik antar individu, kelompok, lembaga atau instansi ataupun negara, dan masyarakat. Memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab memberi arahan, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai

dengan fungsi dan tugasnya. Individu, kelompok, atau instansi juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Dengan begitu, hubungan yang terjadi dalam akuntabilitas merupakan hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

- b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*), pada akuntabilitas orientasi pada hasil diharapkan agar perilaku aparat pemerintah lebih bertanggung jawab, adil, kreatif, dan inovatif. Dimana, dalam konteks disini setiap individu, kelompok, dan institusi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta ikut andil dalam setiap pencapaian hasil maksimal.
- c. Akuntabilitas adanya laporan (*Accountability requires reporting*), laporan kerja merupakan bentuk akuntabilitas, dimana dengan bentuk adanya laporan kinerja berarti mampu menjelaskan setiap tindakan dan hasil yang dicapai baik individu, kelompok, ataupun lembaga institusi, serta bentuk konkrit atau bukti nyata dari proses dan hasil yang telah dilakukan.
- d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*), diartikan sebagai kewajiban memperlihatkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi baik berupa penghargaan maupun sanksi.
- e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*), akuntabilitas memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), diartikan sebagai suatu hubungan dan proses yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal, pendataan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Pada proses ini setiap individu, kelompok, maupun lembaga instansi akan diminta untuk terlibat secara aktif dalam proses evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja.

Prinsip akuntabilitas memiliki perananan penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengukur dampak dari kegiatan tersebut kepada masyarakat sasaran. Selain itu, prinsip ini memiliki fungsi, yaitu sebagai peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar.

2.1.1.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, tentunya perlu berbagai tahapan untuk mencapai suatu kesuksesan atau keberhasilan pemberdayaan tersebut. Untuk mencapai suatu keberhasilan pemberdayaan, tahapan yang dilakukan dapat melalui pengembangan potensi-potensi masyarakat itu sendiri, seperti peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Menurut Adi (2013) dalam (Purbantara & Mujiyanto, 2019) terdapat tujuh tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap persiapan (*engagement*), tahap pengkajian (*assessment*), tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), tahap implementasi kegiatan (*implementation*), tahap evaluasi (*evaluation*), dan tahap terminasi (*termination*).

- a. Tahap persiapan (*engagement*), dalam proses pelaksanaan kegiatan atau program terdapat dua hal yang harus dipersiapkan, yaitu persiapan terkait petugas dan persiapan lapangan. Pada persiapan petugas, setiap peran masing-masing individu pelaku perubahan (*pendamping*) memerlukan persamaan persepsi untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan persiapan lapangan merupakan persiapan melalui studi kelayakan tempat atau wilayah yang akan dijadikan sasaran program pemberdayaan. Apabila wilayah sudah ditentukan, program yang akan dijalankan perlu adanya persetujuan resmi dari aparaturnya daerahnya dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat selaku kelompok yang akan dijadikan sasaran program.
- b. Tahap pengkajian (*assessment*), pada tahapan ini pelaku perubahan perlu menganalisis kendala dan kebutuhan masyarakat sasaran, serta sumber daya yang ada di sekitar wilayah atau tempat tersebut. Pada tahap ini, masyarakat sebagai kelompok sasaran perlu dilibatkan secara aktif untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang keluar dari pendapat masyarakat itu sendiri, yang nantinya di fasilitasi oleh pelaku perubahan.
- c. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pengkajian, dimana *pendamping* melibatkan masyarakat dalam perencanaan agar dapat menyesuaikan program dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

- d. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action planning*), tahap ini merupakan rumusan dari tahap sebelumnya, dimana pendamping dan masyarakat kelompok sasaran bersama-sama menentukan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat menggambarkan program dan tujuan jangka pendek yang akan dicapai.
- e. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*), tahap ini merupakan tahap pelaksanaan atau realisasi suatu program yang sudah dirancang dan direncanakan sebelumnya. Tahap ini merupakan tahapan paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena kurangnya kerja sama antara pendamping atau fasilitator dengan masyarakat sasaran dapat menyebabkan program tidak terlaksana dengan baik.
- f. Tahap evaluasi (*evaluation*), evaluasi merupakan bentuk pengawasan dari program yang sedang berjalan. Pada tahap ini, masyarakat sasaran juga perlu dilibatkan agar mereka mengetahui sejauh mana program berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki dari program tersebut. Hal ini diharapkan agar masyarakat dengan mandiri dalam mengelola program dan program dapat berjalan secara berkelanjutan.
- g. Tahap terminasi (*termination*), tahap ini merupakan tahap pemutus hubungan atau perpisahan secara formal karena program atau proyek telah sampai pada batas waktu perjanjian sebelumnya atau karena kurangnya dana yang disalurkan.

2.1.1.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk menuju keberhasilan, tentunya dapat dilihat dari indikator-indikator yang menyertainya. Adanya indikator keberdayaan juga dapat melihat tingkat keberdayaan masyarakat dalam suatu daerah. Hal ini dapat mempermudah pelaku perubahan atau fasilitator dalam menyesuaikan program apa yang perlu diterapkan di sana. Tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan-kemampuan masyarakat tersebut, seperti kemampuan ekonomi, kemampuan dalam akses kesejahteraan melalui kualitas pendidikan dan keterampilan, dan kemampuan kultur atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungannya dengan dikaitkan

pada empat dimensi, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*) (Irawan, 2022).

Menurut UNDP (1998) dalam (Utomo, 2018), dimensi dan tingkatan pemberdayaan yang harus dicapai dalam pelaksanaan suatu pembangunan atau program pemberdayaan ada pada tiga level, yaitu:

- a. Pemberdayaan pada level individu, pemberdayaan ini berkaitan dengan potensi dan keterampilan setiap diri dari masyarakat.

Salah satu aspek untuk mencapai keberhasilan suatu pembangunan terdapat dalam beberapa indikator capaian atau keberhasilan pada level individu, diantaranya:

- 1) Memiliki suatu keahlian atau keterampilan, dapat diketahui pemberdayaan masyarakat dan keterampilan sendiri memiliki keterkaitan yang erat. Karena, untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dilihat dari kemampuannya untuk mengatasi masalah, dan biasanya hal tersebut juga didukung dari kemampuan dan keterampilan masyarakat yang seringkali dicapai melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan.
- 2) Memiliki kekuatan fisik, kekuatan fisik dalam indikator pemberdayaan dimaksudkan pada kemampuan seseorang dalam mengatasi tantangan dan masalah yang didapat dari hasil mengikuti kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan sarana dan prasarana. Kegiatan yang memang membutuhkan banyak gerakan, konsisten dan terorganisir secara fisik.
- 3) Memiliki modal sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, hal ini dimaksudkan pada arah peningkatan kemandirian masyarakat, dimana masyarakat harus mampu dalam mengetahui kebutuhan, masalah, dan alternatif masalah atau solusi yang dihadapinya, serta bagaimana mengimplementasikannya secara mandiri. Dengan bekal dari mengikuti suatu program berupa pelatihan juga dapat membantu masyarakat mendapatkan keahlian atau keterampilan di bidang yang dipelajarinya, dari

hal tersebut masyarakat dapat terus menggali dan mengembangkan potensi dalam dirinya.

- 4) Memiliki usaha atau keberfungsian lembaga usaha, jika dari ketiga indikator pemberdayaan di atas sudah sepenuhnya dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat, hal tersebut dapat menjadi peluang usaha untuk masyarakat di masa yang akan datang.
- b. Pemberdayaan pada level kelompok, hal ini berkaitan dengan bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan atau program pemberdayaan.

Selanjutnya, setelah indikator pemberdayaan masyarakat pada level individu tercapai atau berhasil, masyarakat memiliki dedikasi untuk terlibat pada capaian atau keberhasilan kepentingan kelompok, beberapa indikator keberhasilan pada level kelompok, diantaranya:

- 1) Mampu merencanakan dan mengambil keputusan, dalam indikator pemberdayaan masyarakat pada level kelompok, seseorang diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mencari alternatif masalah atau merumuskan solusi, dan membuat keputusan yang sesuai dan relevan dengan kondisi di lapangan. Dalam ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan masyarakat yang terlibat aktif di dalamnya.
- 2) Mampu terlibat pada pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama, tentunya dalam suatu pembangunan dan program partisipasi masyarakat selaku kelompok sasaran dalam mengambil keputusan untuk keberhasilan pembangunan kedepannya merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan, karena dengan melibatkan masyarakat selaku subjek bukan obyek dapat meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3) Dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan, dari keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dapat membantu masyarakat lebih mengetahui potensi sumber daya di lingkungannya dan dari hal tersebut masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan atau

program, seperti dalam memanfaatkan infrastruktur yang dapat mempermudah mobilitas, fasilitas publik atau disediakan secara umum yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan program yang dilaksanakan yang dapat mendorong kepada kesejahteraan masyarakat.

- c. Pemberdayaan pada level kesisteman, dimana pada level ini diukur dari kemandirian masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan mandiri ketika tidak bergantung terhadap bantuan dari pihak lain, mandiri secara ekonomi, sosiologis, maupun politis

Sedangkan Menurut Merino dan Carmenado (2012) dalam (Pujo et al., 2018) karakteristik kapasitas organisasi dan kelompok dalam pembangunan berkelanjutan dibagi kedalam dua tingkatan, yaitu tingkat individu dan tingkat sosial. Pada tingkat individu, karakteristik kapasitas masyarakat diukur berdasarkan kepemimpinan, kewirausahaan, keterampilan, organisasi, manajemen, dan perencanaan. Sedangkan pada tingkat sosial mereka diukur berdasarkan partisipasi dan kerjasama, kepercayaan, komunikasi, jaringan, norma, kerja tim, visi, dan strategi. Namun, literatur dan pengukuran lapangan umumnya berfokus pada kapasitas pengembangan organisasi atau personalitas sumber daya manusia hingga membangun kapasitas komunitas.

Tabel 2. 1 Dimensi dan Indikator Pemberdayaan

Dimensi dan Indikator Pemberdayaan	
Dimensi	Indikator
Level individu: Pengembangan potensi dan keterampilan	1. Memiliki suatu keahlian atau keterampilan 2. Memiliki kekuatan fisik 3. Memiliki modal sendiri dan tidak bergantung pada orang lain 4. Memiliki usaha atau keberfungsian lembaga usaha
Level kelompok: Keterlibatan atau partisipasi dalam pembangunan atau program pemberdayaan	1. Mampu merencanakan dan mengambil keputusan 2. Mampu terlibat pada pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama 3. Dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan
Level sistem: Kemandirian masyarakat	Mandiri, dalam artian tidak bergantung terhadap bantuan dari pihak lain

(Sumber: Utomo, 2018)

Menurut Afriansyah et al (2023, hlm. 103) dalam bukunya “Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat”, program pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sukses atau berhasil, jika masyarakat telah sesuai dengan indikator-indikator keberdayaan, seperti:

- a. Mempunyai kemampuan dalam mengakses fasilitas atau berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, bank, pasar, dan lainnya. Selain itu, masyarakat juga mampu memaksimalkan penggunaan seluruh fasilitas dengan baik untuk menunjang kesejahteraan hidupnya.
- b. Mempunyai kemampuan dalam membeli akomoditas yang bersifat primer dan tersier. Primer merupakan akomodasi atau kebutuhan paling utama, seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan tersier merupakan

akomodasi atau kebutuhan sebagai pelengkap dalam hidup, seperti pendidikan, transportasi, alat komunikasi, dan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat di beli secara informal atau tanpa izin dari pihak manapun.

- c. Mampu mengambil setiap keputusan dalam keluarga atau rumah tangga, baik keputusan tersebut sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Pada indikator ini masyarakat juga diukur dalam kemampuan membuka peluang usaha sendiri dengan mengambil berbagai macam risiko yang akan dihadapi kedepannya.
- d. Sadar akan hukum dan politik yang ada di negeri ini. Pada indikator ini keberhasilan masyarakat diukur dari pemahaman administrasi hukum, seperti memiliki kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan membayar kewajiban selaku warga masyarakat dalam pembayaran pajak. Selain itu, ikut serta dalam pemilihan pemilu, mengetahui pilihan dengan baik, dan tidak mudah menerima uang suap dari salah satu dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan.
- e. Mempunyai kemampuan akan menyampaikan pandangan atau pendapat pribadi di ruang publik atau umum untuk kesuksesan pembangunan dan memiliki keberanian dalam memberikan saran dan kritik terhadap penyalahgunaan jabatan atau tata kelola di lingkungannya.
- f. Mampu memiliki aset-aset berharga dan produktif untuk keberlangsungan hidupnya, seperti tabungan transportasi pribadi, tabungan, tanah, dan berbagai macam aspek yang sifatnya jangka panjang.

2.1.2 Program Rumah Dilan (Pendidikan dan Keterampilan)

Menurut Suherman dan Sukjaya (1990) dalam (Ananda & Rafida, 2017, hlm. 5) program merupakan bentuk dari perencanaan-perencanaan yang telah didiskusikan sebelumnya oleh pengelola sesuai kebutuhan sasaran, biasanya perencanaan tersebut berupa sasaran, metode, urutan, dan konteks-konteks tertentu. Sedangkan Menurut Arikunto dan Jabar (2009) dalam (Ananda & Rafida, 2017, hlm. 5), program merupakan suatu unit kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau adanya pihak yang merencanakan program tersebut dengan

melibatkan banyak orang dengan harapan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terdapat unsur-unsur penting dalam suatu program, yaitu: 1) Tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan. 2) Dilaksanakan dalam jangka panjang atau berkelanjutan. 3) Terjadi dalam sebuah institut atau lembaga yang melibatkan masyarakat atau sekelompok orang.

Dalam definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan, program merupakan suatu unit kegiatan yang dirancang berdasarkan keputusan-keputusan yang telah didiskusikan dengan melibatkan banyak orang, dan diharapkan program dapat berjalan dengan jangka panjang atau berkelanjutan. Biasanya program memiliki tujuan untuk memberdayakan dan membantu mengembangkan kemampuan seseorang demi mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang berkualitas. Gelari pelangi merupakan salah satu program pada bidang pemberdayaan dan kesejahteraan hasil rakon TP PKK Pokja II yang sedang berlangsung di desa-desa mandiri dengan berbagai lingkup program kerja, yaitu gerakan gemar membaca, menggerakkan keluarga dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga, penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki di kampung mandiri, selain itu pengembangan usaha penempatan keluarga UP2K, PKK, Tokoh PKK serta pembentukan Koperasi PKK.

Program Rumah Dilan merupakan salah satu *pilot project* Gelari Pelangi yang berfokus atau mewadahi dalam memberikan ilmu pengetahuan pada bidang pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat desa dengan semboyan Ikatan Cinta (Ilmu dan Keterampilan dalam Meraih Cita). Pada program Rumah Dilan, terdapat beberapa program pendukung, diantaranya; 1) program keterampilan membuat batik, 2) keterampilan anyaman bambu, dan 3) sanggar tari. Program Rumah Dilan sendiri memiliki tujuan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menggapai mimpi dan cita-citanya, mampu menjadi masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik, masyarakat yang berdaya dengan keterampilan yang dimiliki untuk bekal hidup kedepannya khususnya masyarakat di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

2.1.3 Keterampilan Masyarakat

Pada dasarnya sifat manusia dalam melakukan atau merealisasikan suatu kegiatan dibutuhkan suatu keterampilan. Keterampilan disini dimaksudkan pada kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan memberikan inovasi-inovasi baru dalam bentuk fisik yang bernilai dan diakui oleh orang lain. Pada program pemberdayaan masyarakat, keterampilan masyarakat sangat diperlukan sebagai bekal tambahan dalam meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Selain itu, adanya keterampilan dapat mempermudah masyarakat dalam mencapai tujuan dan *goals* yang ingin dicapai. Bahkan dengan keterampilan, seseorang dapat membuka mobilitas atau peluang usaha baru.

2.3.1.1 Definisi Keterampilan

Dalam jurnal Ibrahim et al (2020) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin” menjabarkan definisi keterampilan menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Gordon (1994), keterampilan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengoperasikan kegiatan atau pekerjaan dengan mudah dan cermat. Kedua, menurut Nadler (1986), keterampilan merupakan suatu kegiatan yang perlu dibarengi dengan praktek langsung atau bentuk adanya implikasi keterampilan, dimana masyarakat perlu terlibat langsung pada prosesnya. Selanjutnya, menurut Dunnette (1976), keterampilan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan berdasarkan dari pengembangan pengalaman dan pelatihan yang didapatkan sebelumnya.

Soemarjadi (1992) dalam (Asrori, 2020, hlm. 115) mendefinisikan keterampilan sebagai perilaku atau sifat seseorang yang didapatkan dengan proses pembelajaran, yang berasal dari gerakan-gerakan kasar dan tidak teratur, seiring dengan dilakukan pelatihan, gerakan-gerakan kasar dapat berubah menjadi gerakan yang lebih *luwes* atau halus, dengan melalui berbagai tahapan, koordinasi perbedaan dan perpaduan, keterampilan dapat dihasilkan untuk tujuan dan *goals* yang ingin dicapai.

Pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan merupakan kemampuan seseorang yang diperoleh dari suatu pembelajaran atau praktik yang bertujuan agar seseorang dapat lebih terampil dan dengan mudah mengoperasikan kegiatan tertentu.

2.3.1.2 Aspek-Aspek Keterampilan

Menurut Robbins (2000) dalam (Ibrahim et al., 2020), keterampilan dibagi kedalam empat aspek dasar atau utama, yaitu:

- a. Keahlian dasar (*basic literacy skill*) adalah keterampilan yang umum dan wajib dimiliki oleh setiap individu yang meliputi berbagai kemampuan, seperti menulis, membaca, mendengarkan, dan aspek dalam berhitung.
- b. Keahlian teknik (*technical skill*), keterampilan seseorang dalam suatu teknik yang masih pada tahap pengembangan dengan diperoleh melalui pembelajaran khusus, contohnya ketika seseorang menguasai atau terampil dalam bidang yang dipelajarinya.
- c. Keahlian interpersonal (*interpersonal skill*), keahlian atau keterampilan seseorang dalam bersosialisasi, seperti memiliki keterampilan dalam mengemukakan pendapat atau inovasi, memiliki keahlian dalam membangun kerja sama untuk mencapai suatu tujuan.
- d. Pemecahan masalah (*problem solving*), keahlian atau keterampilan dalam berpikir secara logis, kritis, mampu mengetahui penyebab masalah-masalah yang ada dan dapat menyelesaikannya dengan baik.

2.3.1.3 Jenis-Jenis Keterampilan

Dapat diketahui seseorang dapat dikatakan berdaya ketika sudah mencapai kesejahteraan dan kemandirian, dimana kebutuhan, fasilitas atau sarana dan prasarana didapat dari hasil usaha sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Untuk mengetahui seseorang mencapai kemandirian dan kesejahteraan seseorang harus memiliki keahlian atau keterampilan, keterampilan disini diukur dari seberapa terampil individu dalam menguasai bidang yang akan menjadi modal dalam membentuk kegiatan atau pembangunan yang lebih baik. Dengan berbagai keterampilan dan pengalaman juga dapat mempermudah seseorang dalam mengelola suatu program.

Menurut Werther (1996) dalam (Julianto, 2018) keterampilan yang umum dan dibutuhkan dalam pengelolaan suatu program atau organisasi dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya:

- a. Keterampilan konseptual (*conceptual skill*)
Keterampilan ini melibatkan pihak pemikiran atau bentuk inovasi dari pengelola, menyaring informasi, dan kemampuan dalam membentuk perencanaan. Keterampilan ini memerlukan pengetahuan terkait organisasi atau program yang diterapkan dalam suatu wilayah atau lingkungan masyarakat, perusahaan, dan sosial secara meluas. Keterampilan ini berarti menyangkut kemampuan dalam berpikir secara sistematis, pengalaman, pemikiran yang lebih luas, dan dapat digunakan secara berkesinambungan atau jangka panjang.
- b. Keterampilan Manusia (*human skill*)
Keterampilan manusia merupakan keterampilan dalam suatu pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Keterampilan ini dilihat dari cara bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, atau dalam bentuk pemberian nasehat atau motivasi, sarana dan prasarana, mengendalikan, berkomunikasi, dan mampu dalam menghadapi tantangan serta menyelesaikan suatu masalah.
- c. Keterampilan Teknis (*technical skill*)
keterampilan ini menyangkut dalam penyelesaian atau pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu, keterampilan teknis menyangkut pada kemampuan penguasaan metode dan teknik yang dipakai dalam hal-hal tertentu, seperti dalam pengelolaan keuangan, sebagai tutor, dan pembentukan program.

2.3.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan

Menurut Notoatmodjo (2014) dalam (Thabroni, 2022) menuturkan, bahwa keterampilan merupakan bentuk aplikasi dari suatu wawasan atau pengetahuan, sehingga keterampilan seseorang menyangkut pada tingkatan pengetahuan, sedangkan pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

- a. Faktor tingkatan Pendidikan, pada tingkatan pendidikan seseorang diukur seberapa tinggi dalam mengenyam jenjang pendidikan, karena semakin

tingginya pendidikan akan mempengaruhi tingkat wawasan dan pengetahuan yang dimiliki individu, hal tersebut dapat mempermudah individu dalam menerima inovasi atau hal-hal baru seiring berkembangnya zaman.

- b. Faktor usia atau umur, pada faktor ini diukur dari usia seseorang, seiring bertambahnya usia akan mempengaruhi individu semakin dewasa, baik dalam perilaku maupun pemikiran. Pada faktor usia juga seseorang yang sudah cukup dewasa memerlukan pekerjaan dan secara matang mereka melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi taraf hidupnya.
- c. Faktor pengalaman, pengalaman merupakan hal penting atau hal dasar untuk menjadikan seseorang lebih baik dari sebelumnya, dari pengalaman juga, secara matang seseorang dapat mempertimbangkan sesuatu yang menurutnya benar atau tidak benar.

Selain itu, menurut Hidayatun (2018) dalam (Thabroni, 2022) motivasi dan keahlian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterampilan. Karena dengan bentuk motivasi dapat membangun keinginan atau kemampuan dalam diri seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan dan mewujudkan impian yang ingin dicapai. Sedangkan keahlian merupakan suatu bakat atau tekad kuat seseorang dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, yang menjadikan mereka dengan mudah dapat menyerap pengajaran dan terampil pada bidangnya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian relevan merupakan bentuk acuan dalam suatu topik penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan hasil-hasil penelitian yang relevan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memberikan referensi bagi penulis dalam penelitian ini. Berikut hasil-hasil penelitian yang relevan.

Dalam penelitian Hidayat & Ismelani (2022), Purwakarta belum memiliki keterampilan dalam bidang wirausaha. Rendahnya pendidikan yang dikenyam juga menjadikan rendahnya tingkat kreativitas masyarakat Purwakarta. Maka, masyarakat membutuhkan pelatihan. Masalahnya Pelatihan apa yang sesuai dengan

masyarakat dalam meningkatkan keterampilan di bidang usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menyatakan Peran BLK Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sudah cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah alumni BLK Kabupaten Purwakarta yang telah diterima bekerja di perusahaan maupun berwirausaha sendiri sesuai bidangnya masing-masing.

Dalam penelitian Ibrahim et al (2020), potensi masyarakat Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung sangat tinggi, terutama dalam bidang keterampilan, seperti menjahit, tata boga, dan keahlian dalam menggunakan teknologi, namun potensi tersebut dibatasi oleh biaya. PKBM merupakan bentuk solusi menjadikan wadah bagi masyarakat Kelurahan Antapani dalam meningkatkan potensi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dengan menganalisis data melalui observasi, wawancara dengan Staf di PKBM, dan masyarakat. Hasil penelitian menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin melalui program pendidikan dan ekonomi di PKBM Raharja memberikan dampak perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian Fitriani & Muhtadi (2022) fakta realitas sosial di negara kita sampai saat ini masih banyak masyarakat yang hidupnya belum menyentuh kesejahteraan dan masih pada tingkat ketidakberdayaan dan keterbelakangan. Dalam mengatasi masalah tersebut perlu diadakan program pemberdayaan masyarakat. Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) merupakan salah satu lembaga nonpemerintah yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Dimana Yayasan ini memiliki visi dan misi serta program-program unggulan yang bergerak untuk memandirikan serta memberdayakan masyarakat agar mampu membangun serta mengubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Artinya teknik pengumpulan data menggunakan observasi, teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan

keterampilan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) telah mampu membangun kemandirian pada kelima alumni peserta pelatihannya. Hal tersebut terlihat dari sikap kelima alumni peserta pelatihan yang sudah sesuai dengan indikator kemandirian, yaitu memiliki keinginan kuat dalam mengembangkan diri, bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif dalam menghadapi masalah, dan percaya diri serta melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri.

Dalam penelitian Jano et al (2023) kinerja pegawai pada Kantor Pencarian dan Pertolongan belum maksimal. Terdapat gap sebesar 10.29% yang menjadi permasalahan kinerja pegawai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere. Keterampilan dan pengalaman kerja sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan statistik inferensial yaitu regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F dan Uji t. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel kinerja pegawai pegawai, Keterampilan Kerja dan Pengalaman Kerja dikategorikan baik. Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel Keterampilan Kerja dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

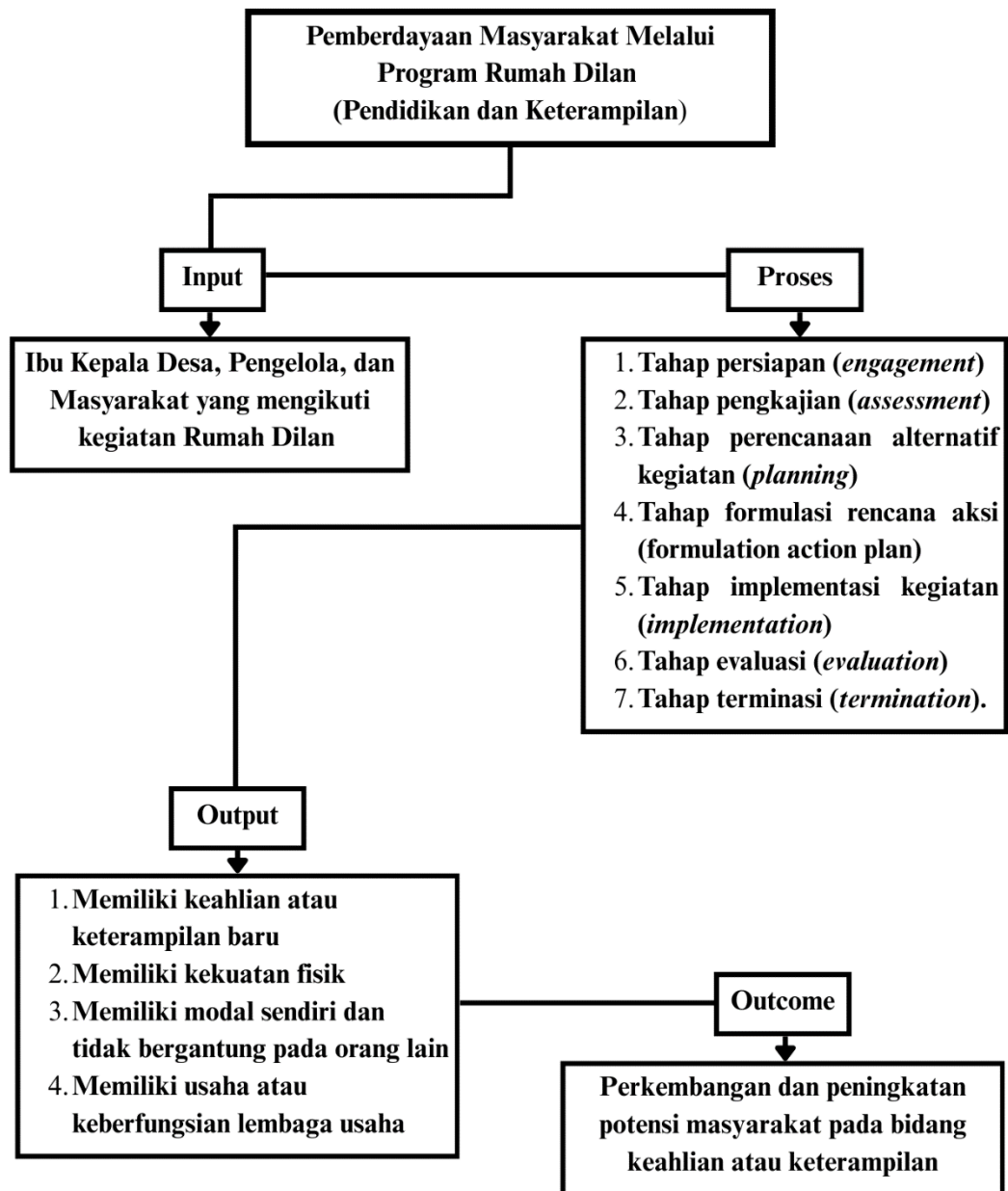
Dalam penelitian Utami et al (2024) Pulau Harapan dan Pulau Kelapa merupakan pulau berpenduduk kecil yang memiliki potensi wisata. Desain kebijakan pengembangan wisata bahari di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa dipandang perlu untuk dilakukan agar terlahir suatu desain atau model kebijakan yang sesuai, efisien, efektif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan merupakan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi identifikasi kebutuhan, pelatihan dan pendampingan, pembentukan jaringan dan kolaborasi. Hasil dari penelitian ini masyarakat mendapatkan program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan untuk meningkatkan metode penyimpanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi digital untuk wirausaha dan peluang usaha yang berorientasi digital. Masyarakat juga mendapatkan keterampilan baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka, menjadikan mereka lebih melek teknologi dan mampu memanfaatkannya secara bijak dan efektif.

2.3 Kerangka Konseptual

Pembangunan berkelanjutan merupakan impian bagi semua para pelaku perubahan, terlebih pembangunan di pedesaan yang masih memiliki masyarakat lemah dan belum berdaya. Paradigma pembangunan sendiri, merupakan suatu pendekatan yang bersifat *people center* atau berpusat pada manusia, dimana keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. SDM yang berkualitas juga berperan penting dalam pembangunan, tinggi rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kualitas seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa dapat menjadi salah satu masalah dalam berjalannya pembangunan, dengan begitu, untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan diperlukan peningkatan kualitas dan pengembangan potensi masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan. Hal ini juga terjadi pada pendidikan masyarakat di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang relatif rendah, dimana sebagian besar masyarakat desa hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SD/ sederajat. Hal ini juga menyebabkan banyaknya masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan hanya berprofesi dalam mengurus rumah tangga.

Dengan begitu, program Rumah Dilan dapat membantu masyarakat desa khususnya Ibu rumah tangga dalam menggali potensi dan mengembangkan pengetahuan, pendidikan serta keterampilan, dengan berbagai program pendukung di dalamnya, yaitu keterampilan membuat, keterampilan anyaman bambu, dan sanggar tari. Selain itu, adanya program ini juga dapat menjadi bekal tambahan masyarakat dengan membuka peluang usaha baru.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Adi (2013) dalam (Purbantara dan Mujiyanto, 2019) sebagai landasan konseptual untuk memahami dinamika proses pemberdayaan melalui tujuh tahapan, yaitu: (1) tahap persiapan (*engagement*), (2) tahap pengkajian (*assessment*), (3) tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), (4) tahap formulasi rencana aksi (*formulation of action plan*), (5) tahap implementasi kegiatan (*implementation*), (6) tahap evaluasi (*evaluation*), dan (7) tahap terminasi (*termination*).



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

(Sumber: Data Peneliti, 2024)

2.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk memandu penelitian ini agar memperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Dilan (Pendidikan Dan Keterampilan)?.
- b. Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Dilan (Pendidikan Dan Keterampilan)?.